



**MULTIKULTURALISME DALAM IPS: PENGENALAN RELASI SOSIAL
ETNIS TIONGHOA DALAM INTEGRASI BANGSA
(Studi Kritis kajian Relasi Gender antar Etnis di Indonesia)**

**Oleh: Ratna Puspitasari
Jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: puspitasariratna72@yahoo.com**

Abstrak

Pendidikan multikultural sudah selayaknya diajarkan di kelas awal IPS. Salah satu keragaman itu adalah pengenalan relasi etnisitas dan gender pada siswa. Sangat jarang guru IPS mengajak siswa menganalisa bahwa sejak dahulu kaum perempuan selalu didiskriminasikan. Kebanyakan dari peradaban besar dunia di zaman kuno menganggap perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Kaum perempuan selalu dianggap lemah dan tidak berharga. Untungnya tidak semua peradaban menganggap bahwa kaum hawa tidak berharga. Sebelum kedatangan bangsa Arya, perempuan di India sangat dihormati. Namun seiring dengan kedatangan bangsa Arya ke India, lama-kelamaan posisi perempuan semakin direndahkan. Begitu pula yang terjadi di Tiongkok (China). Dalam budaya asli Tionghoa kedudukan laki-laki dan wanita merupakan personifikasi dari unsur “Yang” dan “Yin”, yaitu unsur-u yang bersifat aktif dan unsure-unsur yang bersifat pasif. Dalam hal ini “Yang” (aktif) dipersepsikan laki-laki dan “Yin” (pasif) dipersepsikan wanita. Personifikasi tersebut kemudian dibingkai dalam strukturt social dengan system kekerabatan patrilineal dimana keluarga sebagai lembaga dipimpin laki-laki, sehingga laki-laki lebih memiliki kekuasaan daripada wanita. Demikian juga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga atau rumah tangga, kewajiban utama laki-laki dan wanita sifatnya hanya membantu. Dampaknya adalah laki-laki cenderung terlibat dalam sektor perekonomian modern skala luas, sedangkan wanita cenderung berada dalam sektor domestic atau kalaupun sektor perekonomian dalam skala kecil dan lingkungan tempat tinggal.

Kata Kunci: Relasi, Etnisitas, Kesetaraan

A. Pendahuluan

Kemajemukan masyarakat Indonesia akan berimplikasi bagi pembangunan relasi sosial yang positif antar etnis maupun suku bangsa di Indonesia. Ditinjau dari peran publik yang dimainkannya, meskipun secara legal tidak ada diskriminasi, namun peran publik wanita Indonesia memang belumlah terlalu menonjol. Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah kuota untuk memperoleh jabatan publik masih menjadi isu penting dalam perjuangan hak-hak wanita di Indonesia, sehingga dalam hal ini wanita Indonesia masih merupakan kelompok minoritas.

Sementara itu dari segi demografis, jumlah etnis Cina di Indonesia termasuk sebagai kelompok minoritas. Sensus Penduduk tahun 2000 yang mengamati delapan suku bangsa mayoritas di tiap provinsi, etnis Cina hanya terdapat pada 11 provinsi dari 30 provinsi di Indonesia, dengan jumlah total 1.738.936 jiwa (Suryadinata *et al*, 2003: 77-100, khususnya hlm. 86). Menilik sebaran jenis kelaminnya, dari 1.738.936 jiwa tersebut, terdapat 873.239 jumlah laki-laki dan 865.697 wanita. Dari 11 provinsi terdapat, jumlah terbanyak keturunan etnis Cina terdapat di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 460.002 jiwa, dengan 229.591 laki-laki dan 230.411 wanita, terbagi dalam segmen 21,33% generasi muda dan 4,22% generasi tua (Suryadinata *et al*, 2003: 86-88). Berdasarkan data di atas maka tergambar dengan jelas bahwa dalam masyarakat Indonesia, wanita Cina menempati posisi minoritas ganda (*double minority*). Secara demografis menjadi bagian dari kelompok minoritas etnis Cina dan dari segi posisi publik.

Persoalan relasi etnis Cina sangat berbeda disikapi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jika etnis Arab lebih diterima, justru etnis Cina yang kedatangannya lebih dulu (masa Sriwijaya) lebih sulit untuk diterima relasi sosialnya bagi etnis maupun suku bangsa di Indonesia. Pendidikan multikultural dalam IPS mengupas aspek etnisitas khususnya China sangat menarik untuk dikupas. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan dalam paparan tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang

Setelah kemerdekaan di tahun 1945, rakyat Indonesia mengalami euforia kemerdekaan dan merebut banyak perusahaan-perusahaan milik asing dan dinamakan "sentimen anti Belanda". Di antara perusahaan-perusahaan yang direbut termasuk Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), sebuah perusahaan pelayaran milik Belanda yang melayani jalur transportasi dagang dari Belanda menuju Indonesia oleh kelompok buruh Marhaen, dan perebutan-perebutan lapangan-lapangan minyak oleh kelompok pekerja lapangan dan pengilangan minyak zaman kolonial yang bersenjata dan menamakan diri "Laskar Minyak" (Suryadinata, 1999).

Namun setelah beberapa waktu pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Indonesia yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit. Kaum pribumi pun tidak memiliki modal kuat dan nyaris tidak mungkin bersaing dengan perusahaan asing dan Tionghoa. Perusahaan-perusahaan ini mengalami kemunduran setelah diambil alih. Sebagai jalan keluar ditanda tangani persetujuan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda yang isinya Pemerintah akan mengembalikan semua perusahaan asing yang telah diambil alih kepada pemiliknya. Sebagai gantinya untuk memperkuat ekonomi pribumi berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar maka pemerintah Indonesia diberikan hak untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi kepentingan nasional dan "golongan ekonomi lemah" (Melly, 1981).

Pada awal 1950 dikeluarkanlah Program Benteng importir oleh Menteri Kesejahteraan Djuanda, yang mengumumkan bahwa hanya pengusaha pribumi saja yang diberi izin mengimpor barang tertentu yang dikenal sebagai sebutan barang benteng. Dalam penerapannya hal ini menelurkan istilah "Ali Baba" yang berarti kongsi antara kaum pribumi yang memiliki akses birokrasi dengan pengusaha Cina (Suryadinata, 1999).

Pada tanggal 19 Maret 1956 pada Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya, Asaat Datuk Mudo, Mantan Pejabat

Presiden Republik Indonesia berorasi bahwa orang-orang Cina telah bersikap monopolistis dalam perdagangannya dengan tidak membuka jalan bagi penduduk pribumi untuk ikut berdagang (Suryadinata, 1999).

“Orang-orang Cina sebagai satu golongan yang eksklusif menolak masuknya orang-orang lain, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka begitu eksklusif sehingga dalam praktiknya bersikap monopolistis...”

Sebagai penutup Asaat berkata bahwa ia percaya bahwa pada masa itu diperlukan perlindungan khusus di bidang ekonomi kepada warga negara Indonesia asli.

Dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan pada era 1950an hampir semua toko di Indonesia dimiliki pengusaha keturunan Tionghoa. Mulai dari toko kelontong, toko bangunan, hingga toko makanan. Hal ini dibenarkan oleh pengamat budaya Betawi, Alwi Shahab yang menyatakan bahwa pada masa mudanya di daerah Kwitang, Jakarta Pusat, pusat perekonomian di Jakarta betul-betul bergantung pada pengusaha keturunan Tionghoa (Melly, 1981). Pidato ini menjadi awal "gerakan Asaat" atau "pribumisasi" yang dinilai berpengaruh besar pada gerakan anti-Cina selanjutnya. Pada bulan November 1959 dikeluarkan PP Nomor 10 tahun 1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960. PP No.10 ini dimaksudkan untuk menyetatkan perekonomian nasional, namun menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (Suryadinata, 2002). Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali PP No. 10 dan permintaan itu ditolak.

Selanjutnya di depan sidang parlemen, Menteri Subandrio menegaskan, sama sekali tidak diperdapat anasir-anasir anti Cina dalam hubungan pelaksanaan PP No. 10. Pelaksanaan PP No. 10 tersebut, selain

merupakan dimulainya nasionalisasi dan sosialisasi di bidang ekonomi, juga merupakan bagian pelaksanaan dalam revolusi Indonesia, katanya. Dalam nasionalisasi tersebut, PP No.10 memerintahkan agar usaha-usaha pedagang eceran bangsa asing di luar ibukota kabupaten harus ditutup dan pedagang itu hanya boleh berdomisili di tempat tinggalnya. Sedangkan tempatnya berjualan selama ini tidak dibenarkan digunakan untuk usaha dan semua barang-barangnya yang berada di dalam tempatnya berjualan harus diserahkan kepada koperasi.

Pemerintah Cina menyampaikan protes, pada tanggal 10 Desember 1959 radio Peking mengumumkan ajakan warga Cina perantauan untuk kembali ke "kehangatan Ibu Pertiwi". Kedubes RRC di Jakarta segera mendaftarkan Cina perantau yang tertarik oleh ajakan itu (Suryadinata, 2002).

Pada praktiknya "orang asing" pada pasal ini terbatas hanya pada orang Tionghoa karena dari 86.690 pedagang kecil asing yang terdaftar, 90 persennya adalah orang Tionghoa. Saat peraturan ini diterapkan, sekitar 500 ribu pengusaha keturunan Tionghoa terimbas (Majalah Tempo) sedangkan Harian Waspada memiliki perhitungan lain, yaitu terdapat sekitar 25.000 warung/kios milik pedagang asing yang umumnya orang Cina yang terkena PP No. 10 (harian Waspada 1960). Tercatat bahwa di beberapa tempat penerapannya juga dipaksakan dengan kekuatan militer; tidak hanya tidak diperbolehkan berdagang, namun orang Tionghoa dilarang tinggal di tempat tersebut. Di Curut, Cibadak, dan Cimahi hal ini memakan korban.

Di Cimahi, Jawa Barat, terjadi pengusiran orang Tionghoa dan tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa (Majalah Tempo). Namun harian Waspada yang terbit pada tahun 1960 menilai lain, secara umum pelaksanaan PP 10 berjalan lancar, namun di beberapa daerah wilayah Indonesia, seperti Bandung dan Medan, ada pedagang-pedangan asing (Cina) yang menyulitkan pelaksanaan PP 10 sehingga sempat menimbulkan gejolak. Banyak pedagang yang mencoba melakukan praktik spekulasi dengan menutupi/ mengosongkan tokonya dan menimbun barang dagangannya di gudang serta menaikkan harga bahan

pokok (Melly, 1981). Apalagi setelah keluarnya peraturan pemerintah mengenai penyesuaian harga barang-barang. Sesuai instruksi khusus Kejaksaan Agung, di beberapa daerah termasuk di Sumut dibentuk Tim Pengawasan Ekonomi yang bertugas untuk mengadakan pengawasan di bidang ekonomi, menstabilkan harga, mengadakan tindakan drastis kepada siapapun juga yang menghalangi program sandang pangan yang dilakukan pemerintah (Suryadinata, 2002). Tim Operasi Pengawasan Ekonomi yang dibentuk di Sumut berhasil menemukan 200 gudang di Medan yang menimbun bahan-bahan sandang pangan. Dan kepada pedagang bersangkutan dikenakan hukuman badan.

Menanggapi himbuan Pemerintah Peking, sekitar 199 ribu yang mendaftar, namun hanya 102 ribu yang terangkut ke Cina menggunakan kapal yang dikirim oleh pemerintah RRC. Ketegangan berkurang setelah Perdana Menteri RRC Zhou Enlai menemui Presiden Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak di buka sekolah-sekolah dan Universitas. Pada awal 1960-an terjadi penjataan bagi golongan Tionghoa yang hendak melanjutkan bangku kuliah. Hingga akhirnya pada tahun 1966 banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh golongan Tionghoa ditutup oleh pemerintah. Pemerintahan Soeharto berupaya mengasimilasi orang Tionghoa dan pribumi. Perempuan di masa pemerintahan Soeharto tidak semenderita perempuan generasi sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan isu persamaan gender yang mulai mempengaruhi generasi akhir abad ke-20.

2. Perkembangan Stereotype Etnis dalam Pendidikan

Perempuan-perempuan Indonesia (semua suku) mulai dianggap setara dengan kaum laki-laknya. Dampak itu juga berpengaruh terhadap perempuan Tionghoa. Banyak yang sudah berpendidikan tinggi. Kaum laki-laki tionghoa pun pada umumnya sudah menerima kesetaraan gender ini. Walaupun demikian, diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa pada rezim Orde baru ini berpengaruh terhadap perempuan-perempuan Tionghoa. Secara psikologis banyak keturunan Tionghoa yang merasa

terhina. Dampaknya juga secara tidak langsung mengimbas kaum perempuannya. Satu contoh ketidakadilan terhadap keturunan Tionghoa ini adalah sulitnya untuk masuk dalam politik (Melly, 1981). Secara umum, diskriminasi terhadap perempuan Tionghoa pada masa Orde baru ini sama dengan diskriminasi terhadap kaum laki-lakinya.

Akibatnya saat ini mereka ketakutan untuk ikut serta dalam kancan politik. Ketakutan ini juga muncul akibat adanya istilah yang dikeluarkan sejarawan Ong Hok Ham tentang perlakuan yang dialami etnis Tionghoa pada masa lalu, terutama terkait peran etnis itu pada masa kolonial. Dalam bidang pendidikan, khususnya buku sejarah, mestinya dimasukkan peran etnis Tionghoa dalam perjuangan nasionalisme Indonesia. Sejauh ini tidak ada buku sejarah yang menyebut peran orang Cina dalam sejarah Indonesia. Namun sudah ada tanda positif terhadap diakuinya peran etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia, yakni dengan penetapan John Lee yang beretnis Tionghoa sebagai pahlawan nasional (Melly, 1981). Agenda reformasi politik dan sosial di Indonesia yang mulai bergulir sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, juga menjadi tonggak perubahan bagi etnis Cina di Indonesia untuk menuntut adanya kesejajaran sebagai sesama warga negara, terlebih didorong oleh adanya Tragedi 13-15 Mei 1998. Pada masa Presiden Abdurrachman Wahid dikeluarkan Keputusan Presiden No. 6/ 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang selama ini ditengarai menjadi peraturan yang mensahkan adanya pembatasan terhadap segala aktivitas budaya dan tradisi Cina. Setiap menjelang perayaan Imlek atau tahun baru Cina, isu etnis Tionghoa mengemuka.

Dalam diskusi itu juga muncul pertanyaan, mengapa warga keturunan dalam sektor pendidikan kurang berbaur dengan masuk ke sekolah umum. Etnis ini cenderung mencari sekolah yang komunitasnya sebagian besar warga keturunan. Sikap ini dinilai turut memperlambat proses pembauran. Salah satu penyebabnya, jika masuk sekolah umum, mereka kerap menjadi sasaran pemerasan, baik oleh institusi pendidikan maupun antarsiswa. Istilah sapi perahan belum hilang walau fenomena

tersebut sudah muncul sejak masa kolonial Belanda. Namun, tentu saja pada kenyataannya masih saja ada perempuan yang didiskriminasikan oleh keluarganya juga. Hal ini dikarenakan tradisi garis keturunan ayah masih berlaku sampai saat ini. Walaupun demikian, bentuk diskriminasinya tidak sekejam generasi terdahulunya. Hal yang paling menakutkan bagi golongan Tionghoa, khususnya kaum perempuannya adalah kerusuhan Mei 1998. Dampak dari kerusuhan tersebut adalah ketakutan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin sisa traumanya masih ada hingga saat ini. Keturunan Tionghoa dilanda ketakutan karena mereka menjadi serangan massa.

Bahkan banyak perempuan-perempuan Tionghoa yang diperkosa atau mengalami pelecehan seksual. Perempuan Tionghoa yang tidak mengalami pelecehan seksual secara langsung juga menjadi sangat takut. Bentuk diskriminasi perempuan Tionghoa sebelum kemerdekaan meliputi: Dalam hal pernikahan tidak boleh memilih suami, Umumnya tidak mendapat kesempatan bersekolah dan Status di keluarga Tionghoa umumnya di bawah pria. Setelah kemerdekaan: bentuk diskriminasinya sama dengan yang dialami kaum laki-laki Tionghoa, masih ada perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam suatu keluarga Tionghoa. Sebenarnya status perempuan Tionghoa atau perempuan pada umumnya di penghujung abad-20 ini sudah dianggap setara dengan kaum laki-lakinya. Memang pada beberapa tempat mungkin saja masih perlakuan tidak adil terhadap mereka. Perempuan Tionghoa di Indonesia memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan kebebasannya. Ketika abad modern telah mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, perempuan-perempuan umumnya telah mendapatkan kesetaraan ini. Begitu pula dengan perempuan Tionghoa. Namun, sangat disayangkan kerusuhan 13-15 Mei 1998 memori lembaran sejarah akan lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat Tionghoa tradisional.

Gender di lingkungan masyarakat Tionghoa secara umum terkait dengan konsep pemikiran mereka tentang alam semesta. Konsep alam dalam budaya Tionghoa adalah menyatunya unsur ‘Yang’ dan ‘Yin’.

“Yang” merupakan simbol dari kekuatan, keperkasaan, keaktifan, cahaya (siang), panas, matahari, arah selatan. Sedangkan Yin ini merupakan simbol dari segala hal yang bersifat pasif, dingin, gelap (malam), bulan, arah utara, yang semuanya merupakan sifat-sifat dasar wanita. Berdasarkan konsep “Yang” dan “Yin” ini, jelas tampak telah ada pemisahan sifat dan peran anatara sifat laki-laki dan wanita. Walaupun demikian perbedaan sifat “Yang” dan “Yin” ini akan menjaga harmoni alam dan kehidupan (Suryadinata, 2002).

Pengaruh budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Tionghoa juga mempengaruhi peran gender mereka. Kepercayaan dan ajaran moral Taoisme dan Confucianisme telah mengajarkan keharmonisan hubungan-hubungan antara anggota-anggota keluarga dan hubungan-hubungan dalam masyarakat. Taoisme mengajar hubungan-hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, suami dan istri, Raja dan rakyat, saudara yang lebih tua dan saudara yang lebih muda. Confucianisme juga mengatur hubungan-hubungan sosial secara harmonis, antara pemerintah dengan para menteri dan rakyat, ayah dengan anak laki-laki, saudara laki-laki tertua dengan yang lebih muda, suami dengan istri dan teman dengan istri.

Dari ajaran Taoisme dan Confucianisme terlihat jelas bahwa kedudukan wanita Tionghoa mempunyai derajat yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Yang agak mempengaruhi peran gender dalam masyarakat Tionghoa adalah bahwa dalam Confucianisme menganut sistem patrilineal. Kedudukan ayah dan anak laki-laki sangat penting dalam keluarga. Anak laki-laki tertua akan menggantikan kedudukan ayahnya bila ayahnya meninggal. Dalam keluarga warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, dan anak laki-laki tertua yang mendapatkan warisan yang paling banyak.

Bila dasar-dasar hubungan-hubungan sosial seperti dalam ajaran Tao dan Confucius dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka dapat dipastikan bahwa hubungan dengan masyarakat luas juga baik.

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting, karena pada hakekatnya keluarga merupakan tempat kelahiran manusia. Penghormatan terhadap keluarga ini juga terkait dengan etik bahwa laki-laki harus menghormati istrinya sebagai orang yang melahirkan manusia. Walaupun demikian, bila istri tidak dapat melahirkan anak laki-laki, maka suaminya boleh menikah lagi.

Lambang penghormatan terhadap wanita Tionghoa dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa yaitu dilaksakannya pemujaan terhadap Dewi Kuan Yin yang menjadi lambang kasih sayang.

Dari fakta-fakta yang hidup dalam masyarakat Tionghoa, maka dapat dikatakan bahwa di satu sisi wanita tampak mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki tetapi di satu sisi lain sebagai pelengkap untuk bisa memperkuat kedudukan laki-laki melalui sistem kekerabatan patrilineal.

Sebelum abad ke-20 wanita tionghoa di Indonesia, baik dari golongan Tionghoa totok maupun Tionghoa peranakan, belum memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang mereka peroleh adalah pendidikan dari lingkungan keluarga, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan moral kesusilaan, etika pergaulan, agama dan kepercayaan, budaya dan tradisi, pengelolaan rumahtangga, ketrampilan-ketrampilan lain yang bersifat kewanitaan dan lain-lain.

Setelah sekolah-sekolah Tionghoa Hwee Koan, yaitu sekolah khusus untuk orang Tionghoa dibangun pada sekitar tahun 1900-an, barulah wanita-wanita Tionghoa mendapat kesempatan memperoleh pendidikan formal. Walaupun sudah ada sekolah khusus untuk orang Tionghoa yang masuk sekolah ini masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan adat yang tidak memberi kebebasan kepada wanita Tionghoa untuk bergerak di luar rumah, khususnya wanita di lingkungan masyarakat Tionghoa totok.

Seiring dengan perkembangan jaman wanita Tionghoa semakin banyak yang menempuh pendidikan di sekolah Tionghoa Hwee Koan. Bahkan pada masa itu sudah ada wanita tionghoa peranakan yang

bersekolah di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Mereka yang bersekolah di sekolah Belanda membuka Hollands Chinese School, yaitu sekolah Belanda khusus untuk orang-orang Tionghoa, sekolah ini menjadi pilihan golongan Tionghoa peranakan dalam menempuh pendidikan. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, sekolah-sekolah Belanda dan Tionghoa Belanda ditutup sehingga hanya sekolah Tionghoa yang menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat Tionghoa, baik Tionghoa totok maupun Tionghoa peranakan. Setelah kemerdekaan Indonesia, sekolah Tionghoa masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Tionghoa dalam menempuh pendidikan sampai terjadinya peristiwa G30S. Setelah tahun 1965 pemerintah mengambil kebijakan untuk menutup sekolah Tionghoa sehingga semua orang Tionghoa peranakan masuk sekolah negeri atau sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan Katholik dan Kristen .

Pendidikan Barat telah menyebabkan perubahan pada golongan Tionghoa peranakan, terutama pada kehidupan wanita, yaitu perubahan dalam pemikiran, orientasi budaya dan interaksi sosial dengan masyarakat. Konsep-konsep tentang kebebasan, demokrasi, emansipasi, hak asasi dan sebagainya, yang mereka peroleh dari bangku sekolah, telah menimbulkan kesadaran baru, bahwa wanita juga mempunyai hak untuk maju dan dapat diharapkan partisipasinya dalam masyarakat. Dengan demikian aturan-aturan adat yang mengekang kebebasan mereka, secara bertahap dan perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Tradisi pingitan dan perjodohan sudah tidak dikenal lagi oleh generasi baru Tionghoa peranakan dewasa ini.

Selain itu prinsip-prinsip agama Katholik dan agama kristen Protestan yang mereka kenal dari bangku sekolah juga telah membawa mereka menjadi pemeluk. Prinsip-prinsip agama Katholik dan Kristen yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan wanita serta menempatkan masing-masing individu dalam peran dan posisinya, telah merubah pola pikiran dan pandangan wanita Tionghoa peranakan, yaitu bahwa kedudukan mereka keluarga dan masyarakat sederajat dan sejajar dengan laki-laki sesuai dengan kodratnya. Dalam kehidupan sehari-hari

selain melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan agama yang dianut, mereka juga masih melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi dan budaya laluhur, walaupun sudah tidak sesering dan serumit jaman dahulu. Sejalan dengan kemajuan jaman yang dicapai wanita Tionghoa, menjadi perubahan dalam pola hubungan kemasyarakatannya, yaitu mereka lebih terbuka dalam menerima perubahan-perubahan dan terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat mereka menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Jawa. Pada masa-masa sebelumnya mereka banyak menggunakan bahasa Kuo-yu dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Perubahan di bidang sosial budaya juga tampak dari penampilan dan cara berbusana wanita Tionghoa. Sebelum mereka bersentuhan dengan budaya barat, mereka menggunakan busana “Cheong-Sam” terutama wanita Tionghoa totok, dan wanita Tionghoa peranakan menganakan busana “Kabaya Encim”. Dewasa ini wanita berbusana sesuai perkembangan mode serta mengikuti cara berbusana orang barat. Aktivitas wanita Tionghoa di bidang sosial dan pendidikan merupakan salah-satu bentuk kepedulian mereka untuk membantu masyarakat sekitarnya dalam masalah pendidikan, agama, kepercayaan, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian kita dapat melihat dewasa ini wanita Tionghoa banyak yang aktif di perkumpulan gereja, perklumpulan kelompok agama/kepercayaan lain seperti perkumpulan Rasa Darma, Tri Darma, Sam Kauw Hwee (perkumpulan tiga pemeluk agama yaitu Budha, Confucius, dan Tao) serta perkumpulan pemeluk kepercayaan Confucius.

Kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka dalam berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat luas memberikan dampak lain kepada wanita Tionghoa dalam melakukan aktivitas ekonomi. Mereka mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bergerak di bidang usaha, perdagangan, dan bidang-bidang pekerjaan lain yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dan dapat menopang perekonomian keluarga. Lingkungan keluarga yang mempunyai latarbelakang sebagai pedagang serta karakter yang terbentuk dari ajaran-ajar Confucius, Tao, Budha, yang mengajarkan

sikap rajin, tekun, teliti, ulet, hemat, mau bekerja keras, telah mengantarkan wanita Tionghoa mempunyai kemajuan di bidang ekonomi. Dewasa ini bukan hanya bidang perdagangan saja yang bisa ditekuni oleh wanita Tionghoa, mereka juga mempunyai profesi lain seperti dokter, notaris, ahli hukum, pendidik, pegawai negeri, pegawai perusahaan atau industri dan lain sebagainya, yang tujuan utamanya tidak lagi sekedar mencari nafkah, tetapi lebih luas yaitu untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan ilmu pengetahuannya.

Dalam kehidupan politik aktivitas wanita Tionghoa tidak terlalu tampak. Hal ini disebabkan karena perjalanan sejarah yang kurang melibatkan orang-orang Tionghoa dalam bidang politik di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan gerakan 30 September 1965. Walaupun demikian, sebagian besar golongan Tionghoa peranakan, termasuk wanitanya sudah mempunyai kesadaran untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan menjadi WNI mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan WNI lainnya, terutama dalam bidang politik. Salah satu bentuk partisipasi wanita Tionghoa dalam bidang politik adalah ikut aktif dalam pemilihan umum dan menjadi pendukung partai yang dianggap sesuai aspirasinya.

Wanita Tionghoa kecuali disibukkan dengan urusan rumah tangga dan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar lingkup rumah-tangganya dalam berbagai organisasi sosial. Mereka banyak bergerak dalam organisasi gereja, organisasi yang berkaitan dengan agama Budha, Confucius, dan Tao serta organisasi pendidikan yang ada di bawah organisasi organisasi tersebut di atas dan mengikuti kegiatan PKK.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan mayoritas wanita etnis Cina yang menjadi anggota organisasi gereja 30%, sedangkan yang menjadi anggota organisasi Budha, Confucius, dan Tao 20%, yang menjadi pengurus organisasi pendidikan 10%, dan menjadi anggota PKK 30%, dan 10% tidak mengikuti organisasi-organisasi semacam itu. Khusus untuk organisasi pendidikan wanita Tionghoa sangat aktif dalam yayasan

Khong Kauw Hwee yang bergerak di bidang pendidikan untuk mengembangkan pengajaran Confucius. Lembaga ini mendirikan sekolah taman kanak-kanak, khusus untuk anak-anak Tionghoa. Pendirian TK ini bertujuan untuk memberikan pendidikan pada anak-anak Tionghoa yang tidak mampu. Selain mengikuti organisasi-organisasi tersebut di atas, wanita Tionghoa mengikuti kegiatan arisan yaitu arisan yang diadakan untuk wanita yang sudah berkeluarga dan remaja putri. Arisan ini mempunyai tujuan untuk mengakrabkan dan mempererat hubungan antara sesama warga setempat. Dalam acara arisan ini sering diisi dengan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan keluarga berencana, memberikan ketrampilan-ketrampilan kewanitaan dan lain-lain.

Partisipasi wanita Tionghoa dalam program Keluarga Berencana dipandang penting karena budaya mereka menganggap bahwa anak yang banyak akan mendatangkan banyak rejeki pula. Pandangan ini sudah tidak sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk menunjang program tersebut wanita Tionghoa banyak yang sudah mengikuti program keluarga berencana terutama wanita Tionghoa yang berpendidikan dan berpikiran maju. Walaupun demikian masih banyak wanita Tionghoa yang belum menyadari pentingnya program keluarga berencana bagi pembangunan Indonesia. Dari temua di lapangan 40% wanita Tionghoa sudah melakukan program KB bagi dengan kesadaran sendiri, 30% melakukan program KB karena ikut-ikutan dan karena malu, sedangkan 30% . Tidak melakukan prgram KB. Dari seluruh responden yang telah mengikuti program KB dapat dilihat sebanyak 70% berpendidikan tinggi, sedangkan 20% berpendidikan rendah dan 10% tidak berpendidikan. Dengan demikian partisipasi wanita Tionghoa dalam program KB dapat diharapkan lebih baik pada masa-masa mendatang.

Ada perbedaan peran laki-laki dan wanita merupakan pemahaman yang lahir sebagai akibat pelaksanaan tradisi dan budaya Tionghoa yang bersumber dari ajaran Confucius dan Tao dimana laki-laki cenderung menempati posisi ordinat, sedangkan wanita di posisi subordinat. keadaan atau posisi etnis Cina di dalam masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah

reformasi, secara keseluruhan belum mengalami perubahan yang berarti. Kebijakan Pemerintah Orde Baru yang membatasi ruang gerak etnis Cina agar hanya berkecimpung di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya, serta kenyataan yang seolah selalu ‘mengorbankan’ mereka ketika terjadi konflik atau krisis sosial, telah meninggalkan trauma yang membekas sangat dalam di kalangan warga etnis Cina. Di sisi lain kebijakan pemerintah yang berbentuk upaya mengasimilasikan etnis Cina kedalam masyarakat Indonesia secara total, hasilnya justru mengecewakan. Dampak kebijakan Pemerintah Orde Baru khususnya di tiga bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, dan permukiman, cenderung kontraproduktif. Dalam bidang pendidikan antara lain menerapkan kebijakan membatasi rasio jumlah mahasiswa etnis Cina di sekolah-sekolah dan universitas negeri sehingga mereka cenderung belajar di sekolah dan perguruan tinggi swasta yang umumnya bermutu lebih baik atau sekolah di luar negeri. Hal ini telah menyebabkan mereka semakin berbeda dengan ‘pribumi’ baik secara intelektual maupun emosional. Sangat terbatasnya pilihan bidang yang dipilih oleh wanita Cina di *Jabodetabek* dalam mengaktualisasikan peran di bidang pendidikan sekali lagi menunjukkan bahwa makna yang muncul dari interaksi yang dilakukan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya, baik berkaitan dengan kemampuan individu dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang dijumpainya maupun pertimbangannya atas ekspektasi orang lain terhadap perannya di bidang pendidikan yang harus dimainkannya. Dalam kaitan dengan pilihan bidang aktualisasi, makna yang muncul adalah kecenderungan untuk memilih bidang yang dianggap **aman** atau tidak berdampak buruk terhadap kehidupannya secara keseluruhan. Adanya wanita Cina dari generasi tua yang memilih berkiprah di bidang politik membuktikan bahwa kemampuan individu menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam suatu interaksi sangat tergantung pada keaktifan atau motivasi dari dalam diri subyek sendiri

3. Potensi Etnis dan Pendidikan

Kita melihat dewasa ini potensi wanita Tionghoa di Indonesia dalam pembangunan sangat besar. Partisipasi mereka di bidang pendidikan tidak dapat diabaikan. Untuk mencapai keadaan seperti tersebut di atas melalui proses yang sangat lama. Hingga pertengahan abad ke-20 keadaan wanita Tionghoa belum menggembirakan. Mereka terkungkung dalam adat yang keras yang membatasi kebebasan dan aktivitas mereka. Pada masa itu keterbatasan aktivitas wanita Tionghoa di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat gender. Dalam pendidikan wanita Tionghoa tertinggal jauh dibanding dengan laki-laki karena dalam budaya Tionghoa kedudukan wanita berada di bawah laki-laki. Mereka tidak mempunyai hak dalam memperoleh kemajuan. Hal ini ditambah dengan adanya tradisi pingitan semakin membatasi aktivitas wanita Tionghoa. Keadaan berubah setelah dibuka pendidikan untuk anak-anak Tionghoa termasuk anak wanita. Pendidikan ini telah membawa perubahan yaitu perubahan dalam aktivitas wanita Tionghoa. Pendidikan telah menumbuhkan kesadaran tentang adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita, kesadaran tentang kebebasan dalam melakukan aktivitas dan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Dari sini ketidakadilan gender mulai mendapat perlawanan, meskipun dalam tataran yang bersifat politik.

Wanita Tionghoa di Indonesia kecuali disibukkan dengan urusan rumah tangga dan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar lingkup rumah tangganya dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan (Melly, 1981). Mereka aktif dalam organisasi gereja, organisasi agama Budha, Confucius dan Tao serta organisasi pendidikan dan PKK. Selain itu mereka juga sudah aktif berpartisipasi mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Partisipasi mereka secara umum memang masih kental dengan corak partisipasi di sektor domestik atau tidak terlalu jauh dengan sektor itu.

4. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural

Tilaar (2003) berpendapat bahwa untuk mengaplikasikan pendidikan multikultural yang berwawasan kebangsaan dengan menjunjung semangat penghargaan pada etnisitas di Indonesia ada beberapa pendekatan diantaranya adalah:

- a. Pengajaran bagi perbedaan kultural dan eksepsional (*Teaching of the Exceptional and the Culturally Different*)

Jika anda sebagai guru meyakini bahwa kepala sekolah bertanggungjawab untuk mempersiapkan semua peserta didik untuk menyesuaikan diri ke dalam (lingkungannya) dan mencapai keberadaan sekolah dan masyarakat, pendekatan ini mungkin yang anda perlukan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperlengkapi murid dengan keterampilan kognitif, konsep, informasi, bahasa, dan nilai-nilai tradisional yang diperlukan oleh masyarakat (Amerika) dan padahal untuk memperbolehkan mereka untuk menggenggam satu pekerjaan dan fungsi diantara dengan institusi kemasyarakatan dan budaya (Tilaar, 2003). Guru mempergunakan pendekatan ini sering memulai dengan menentukan taraf pencapaian dari proses pembelajaran dari murid, kemudian membandingkan pencapaian mereka untuk menyusun standar kompetensi, kemudian bekerja dengan rajin untuk menolong yang berada di belakang dengan melakukan remidi (Melly, 1981).

Banyak dokumen penelitian menerangkan bahwa kekuatan dari kelompok para peserta didik yang berbeda sosial budaya, menyarankan bahwa guru hendaklah belajar mengidentifikasi dan membangun kekuatan mereka, peserta didik akan belajar jauh lebih efektif dibandingkan kalau guru mengasumsikan anak tidak dapat belajar dengan baik (Tilaar, 2003). Guru yang memahami bagaimana caranya membangun budaya dan bahasa dari peserta didik akan membaca perilaku dari anak-anak di dalam ruangan kelas dengan lebih teliti dan mengikuti proses pembelajaran mereka tanpa penurunan harapan mereka untuk belajar (Mahfud, 2006). Ringkasnya, pendekatan dengan perasaan adalah membangun jembatan untuk peserta didik untuk

menolong mereka memperoleh keterampilan kognitif dan pengetahuan yang diharapkan dari kelas murid.

b. Pendekatan hubungan antar manusia (*Human Relations Approach*)

Jika anda sebagai guru meyakini bahwa tujuan utama dari sekolah adalah untuk menolong para siswa untuk belajar hidup bersama-sama secara harmonis pada satu dunia yang menjadi (dunia) lebih kecil dan lebih kecil dan jika anda meyakini bahwa persamaan sosial lebih besar akan menghasilkan kalau murid belajar menghormati satu sama lain dengan tanpa melihat perbedaan, kelas, gender, atau penyandang cacat, mungkin pendekatan ini menarik bagi anda (Mahfud, 2006).

- 1) Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan satu perasaan kesatuan, toleransi, dan penerimaan diantara orang-orang: “Aku adalah setuju dan kamu juga setuju. “
- 2) Pendekatan hubungan antar manusia melahirkan perasaan positif diantara murid yang berbeda, meningkatkan identitas group dan rasa bangga untuk murid dari warna kulitnya, mengurangi stereotip, dan usaha mengeliminir prejudice dan bias.
- 3) Kurikulum untuk hubungan antar manusia berupa pendekatan perbedaan alam individu dan similarities.
- 4) Proses pembelajaran meliputi sangat menekankan kerjasama (*cooperative learning*), permainan peranan, dan pengalaman seolah-olah mengalami sendiri atau nyata, untuk membantu murid mengembangkan penghargaan dari orang lain.
- 5) Advokat dari pendekatan ini harus bersifat menyeluruh, diintegrasikan ke dalam beberapa daerah pokok, dan *schoolwide*.
- 6) Sementara itu pengajaran pengecualian dan secara kultural perbedaan pendekatan menekankan membantu pencapaian ketrampilan kognitif, dan pengetahuan dalam kurikulum tradisional, pendekatan hubungan kemanusiaan memfokuskan pada tingkah laku dan perasaan para siswa tentang mereka sendiri dan satu sama lain.

c. Pendekatan belajar kelompok (*Single-Group Studies Approach*)

- 1) Kita mempergunakan frasa *single-group studies* untuk menunjukkan studi dari bagian kelompok masyarakat, antara lain, pembelajaran bagi penyandang cacat atau pembelajaran orang-orang (Asli Amerika).
- 2) Pendekatan belajar kelompok untuk memunculkan status sosial dari kelompoknya, dengan membantu generasi muda menguji bagaimana sebuah kelompok telah mengalami tekanan sejarah, bagaimana kemampuannya dan pencapaiannya.
- 3) Tidak sama dengan kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan yang satu ini (dan berikutnya dua) memperlihatkan pengetahuan sekolah sebagai politis dibandingkan netral dan menyajikan alternatif keberadaan *Eurocentric*, kurikulum didominasi laki-laki.
- 4) *Single-Group studies* diorientasikan ke arah aksi politik dan liberasi.
- 5) Advokasi dari pendekatan ini mengharapkan bahwa para siswa akan mengembangkan lebih hormat untuk group dan pengetahuan dan komitmen untuk bekerja meningkatkan status groupnya di masyarakat.
- 6) Kurikulum *single-group studies* meliputi unit atau kursus tentang sejarah dan budaya dari sekelompok (misalnya, Riwayat Amerika afrika, Daftar pustaka Chicano, pembahasan penyandang cacat).
- 7) Ini mengajari bagaimana sebuah kelompok telah menjadi korban dan berjuang memperoleh kehormatan seperti isu-isu sosial yang nampak dihadapi oleh sekelompok masyarakat.
- 8) Walau *single-group studies* fokus pada kurikulum, mereka juga memberikan beberapa perhatian ke proses pembelajaran yang menguntungkan tujuan kelompok.
- 9) Secara ringkas, pendekatan the *single-group studies* bekerja ke arah perubahan sosial.
- 10) Tantangan pengetahuan secara normal ini diajarkan di sekolah-sekolah, sebagai bantahan bahwa pengetahuan itu menguatkan kontrol oleh para orang kulit putih di atas orang lain.

11) Penawaran pendekatan ini satu pembahasan mendalam dari group ditekan dengan maksud anggota group memberikan kuasa, mengembangkan pada mereka rasa kesadaran bangga pada groupnya, dan membantu anggota dari group dominan memahami darimana orang lain berada.

d. Pendekatan Pendidikan Multikultur

Pendekatan ini memadukan banyak ide dari tiga pendekatan sebelumnya.

- 1) Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengurangi *prejudice* dan diskriminasi, untuk berusaha ke arah persamaan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh golongan, dan memberikan efek distribusi yang baik dari kekuatan anggota masyarakat dari budaya yang berbeda-beda.
- 2) Berbagai praktek dan proses pada sekolah direkonstruksi yang akhirnya menuju pada persamaan model sekolah dan pluralisme.
- 3) Antara lain, kurikulum diorganisir sekitar konsep-konsep berdasar pada disiplin ilmu pengetahuan sosial, tapi kontennya menguraikan konsep itu yang diambil dari pengalaman dan perspektif dari beberapa kelompok orang.
- 4) Pendekatan ini, berangkat dari asumsi bahwa para siswa adalah mampu belajar materi secara kompleks dan mampu mencapai penampilan pada satu taraf keterampilan yang tinggi. Masing-masing murid punya satu pribadi, gaya belajar yang unik dan guru harus mampu menemukan dan membangunnya ketika mengajari.
- 5) Belajar kerjasama dikembangkan, dan antara siswa putera dan puteri diperlakukan dengan sama pada satu etika nonsexist.
- 6) Seorang staff yang berbeda mungkin bertanggung jawab dan ditugaskan *nonstereotypically*.
- 7) Idealnya, diajarkan lebih dari satu bahasa, yang memperbolehkan semua murid untuk bisa dua bahasa.
- 8) Pendekatan pendidikan multikultural, lebih dari tiga pendekatan sebelumnya, mendukung reformasi sekolah secara total untuk membuat sekolah merefleksi tentang keaneka ragaman dan lain-lain.

9) Itu juga mendukung pemberian perhatian yang sama pada berbagai budaya group dengan tanpa melihat apakah spesifikasi dari kelompok-kelompok terwakili pada populasi siswa sekolah.

e. Pendidikan Multikultural ber-Keadilan Sosial (*Multicultural Social Justice Education*)

- 1) *Multicultural social justice education* mengarah pada pendidikan lebih secara langsung dibandingkan pendekatan yang lain dengan tekanan dan ketidaksamaan struktur kemasyarakatan yang berlandaskan ras, kelas sosial, gender, dan penyandang cacat.
- 2) Tujuan pendekatan ini adalah untuk mempersiapkan warga di masa yang akan datang untuk mengambil peran untuk membuat masyarakat lebih baik dengan pelayanan yang menarik dari semua kelompok masyarakat, terutama dalam perbedaan warna kulit, kemiskinan, kaum perempuan, atau penyandang cacat.
- 3) Pendekatan ini direkonstruksikan pada masyarakat, dengan maksud merekonstruksi masyarakat ke arah persamaan ras, kelas sosial, gender, dan penyandang cacat.
- 4) Pendekatan ini memperluas Pendekatan Pendidikan multikultural pada kurikulum dan mengarah dari keduanya adalah sangat serupa, tapi ada empat praktisi unik ke Pendidikan keadilan sosial multikultural.
- 5) Demokrasi dengan aktif terlatih pada sekolah (Bank, 2007; Parker, 2003).
- 6) Bagi murid untuk memahami demokrasi, mereka harus hidup berdemokrasi.
- 7) Mereka harus mempraktekkan politik, berdebat, tindakan sosial, dan penggunaan dari kekuatan (Osler & Starkey, 2005).
- 8) Di dalam kelas, berarti bahwa murid diberikan kesempatan untuk langsung belajar yang sesuai dengan perasaan yang nyaman dalam pembelajarannya, dan untuk mempelajari bagaimana caranya bertanggung-jawab secara langsung.

- 9) Murid mempelajari bagaimana caranya meneliti ketidaksamaan kelembagaan pada keadaan hidup mereka sendiri.

C. Kesimpulan

Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme dalam pendidikan IPS yang pada dasarnya kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau “politics of recognition”. Multikulturalisme dalam IPS mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain sehingga tercipta kelas IPS yang menghargai keberagaman sebagai kekayaan.

Inti dari multikulturalisme dalam pembelajaran IPS adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan siswa lain. Setiap siswa ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap siswa tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat.

Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Konsep multikulturalisme IPS dalam menghargai etnisitas di kelas, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. “*Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*”. (03 September, 2003).
- Burhanuddin, dkk. 1988. *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- Choirul, Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S.
- H.A.R Tilaar. *Pendidikan dan Kekuasaan*. (Magelang, 2003)
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Hernandez, Hilda. 2002. *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. New Jersey & Ohio: Prentice Hall.
- Khumaidah, Umi. 2004. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Pendidikan Multikultural, Menuju Pendidikan Islami yang Humanis*. Yogyakarta: Presma Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Periode 2003-2004 Dan Ar-Ruzz Media.
- Koentjaraningrat. 1964. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Universitas.
- Maslikhah. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*. Salatiga: Kerja sama STAIN Salatiga Press Dengan Jp Books.
- Nanih, Mahendrawati dan Ahmad Syafe'i. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Parsudi Suparlan. Tersedia pada [http://www.interseksi.org/publications/essays/articles /masyarakat_majemuk.html](http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html). Diakses tanggal 16 Februari 2009.
- Riswanti, Yulia. *Urgensi Pendidikan Islam dalam Membangun Multikulturalisme*. Jurnal Kependidikan Islam, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2008.
- Suryadinata Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: Pustaka LP3ESSS Indonesia.
- Tan Melly G. 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- W.f. Wertheim. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understan untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta, 2005)
- Yusri, Muhammad F.M. *Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-Agama di Indonesia*. *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3, No.2, Juli-Desember 2008.
- Zuhairi, Misrawi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. (Jakarta, 2007)